



Tren Korupsi Kesehatan

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Organisasi Presentasi



I. Latar Belakang

II. Tujuan

III. Metodologi

IV. Temuan

V. Kesimpulan/Rekomendasi

Contents 1

Contents 2

I. Latar Belakang



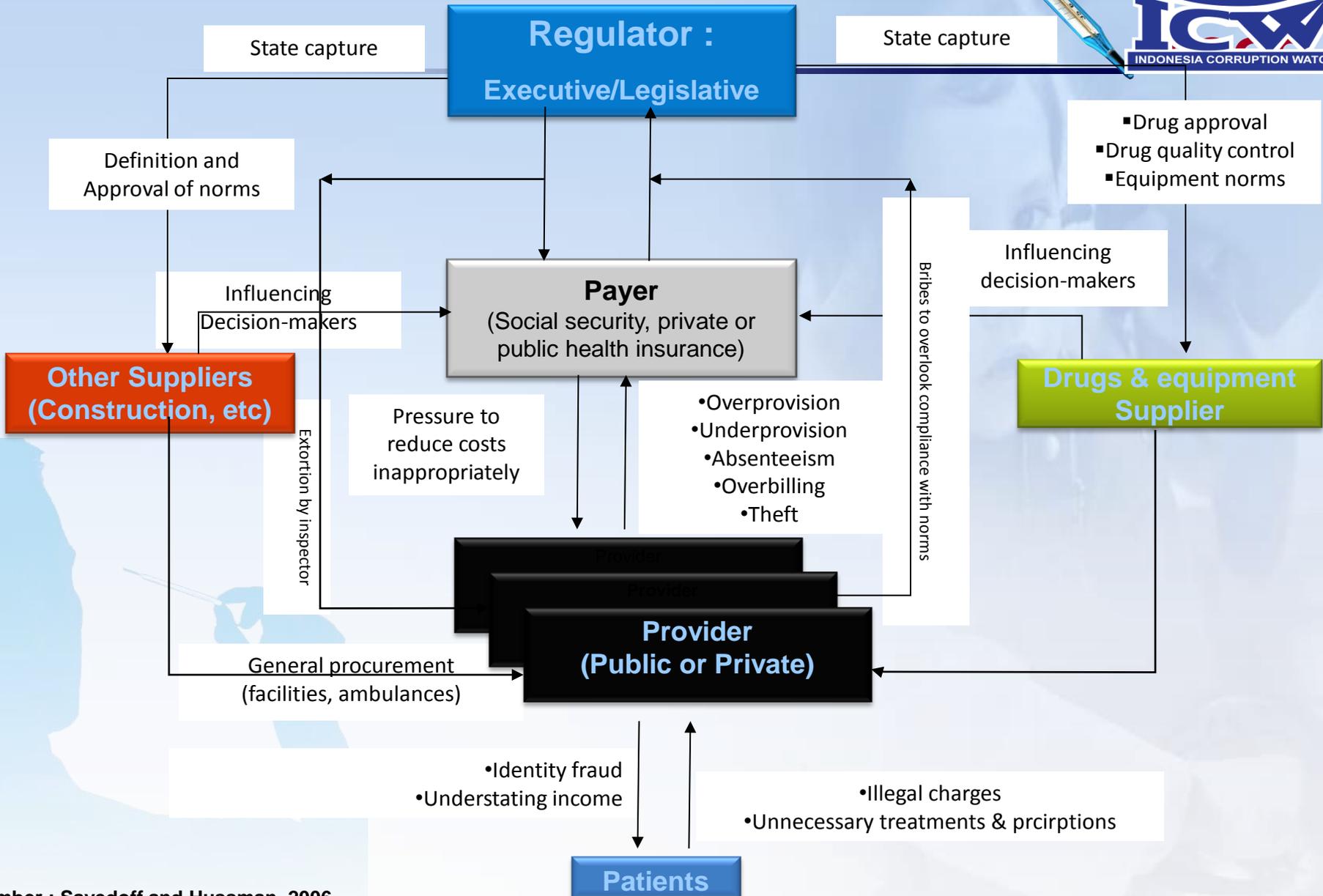
- Kesehatan merupakan sektor dasar yang menjamin hak kesehatan sehat warga
- Anggaran kesehatan (APBN dan APBD) selalu meningkat setiap tahun
- Pengelolaan anggaran kesehatan masih kurang efisien dan rawan korupsi
- Program kesehatan pemerintah menjadi tidak efektif.
- Derajat kesehatan rakyat Indonesia masih belum menunjukkan performa yang baik

Tujuan



- Secara umum laporan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem penganggaran dan pengelolaan anggaran kesehatan di semua jenjang pemerintah mulai dari pusat dan daerah.
- Secara khusus laporan bertujuan untuk :
 - Memberikan gambaran titik rawan (pelaku, obyek korupsi, kerugian negara, modus, institusi dan lokasi) korupsi disektor kesehatan
 - Mengungkap kinerja penegak hukum dalam menindak korupsi disektor kesehatan
 - Menyediakan bahan untuk perbaikan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran kesehatan diseluruh jenjang pemerintahan pusat dan daerah.

Kerangka Pemikiran



METODOLOGI



- Definisi :
 - Kasus korupsi yang terjadi disektor kesehatan dan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) telah masuk tahap serta telah memiliki tersangka
- Sumber Data :
 - Kasus korupsi kesehatan yang telah diungkap pada publik baik melalui media cetak dan elektronik oleh penegak hukum

METODOLOGI

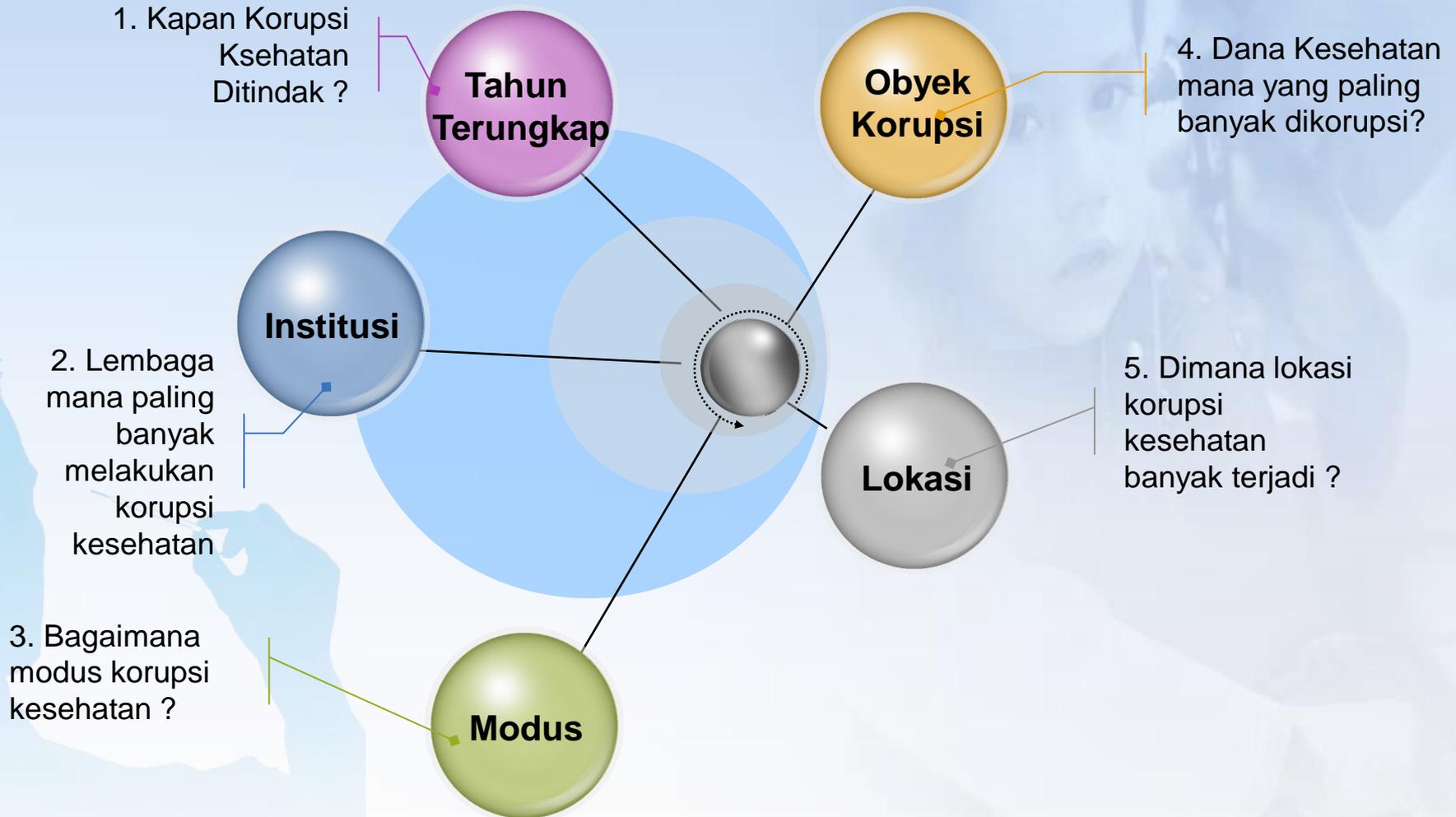


- Kelemahan :
 - Belum semua praktek korupsi kesehatan berhasil dijerat penegak hukum
 - Belum semua kasus korupsi kesehatan terutama yang sudah masuk tahap penyidikan diungkap pada publik oleh penegak hukum.
- Dengan kelemahan ini maka tren korupsi kesehatan terbatas mengungkap potret korupsi di sektor kesehatan.

Diagram Presentasi Temuan



LOGO



Periode Pemantauan



Hasil Dan Temuan Pemantauan



Korupsi Kesehatan Berdasarkan Tahun Penindakan



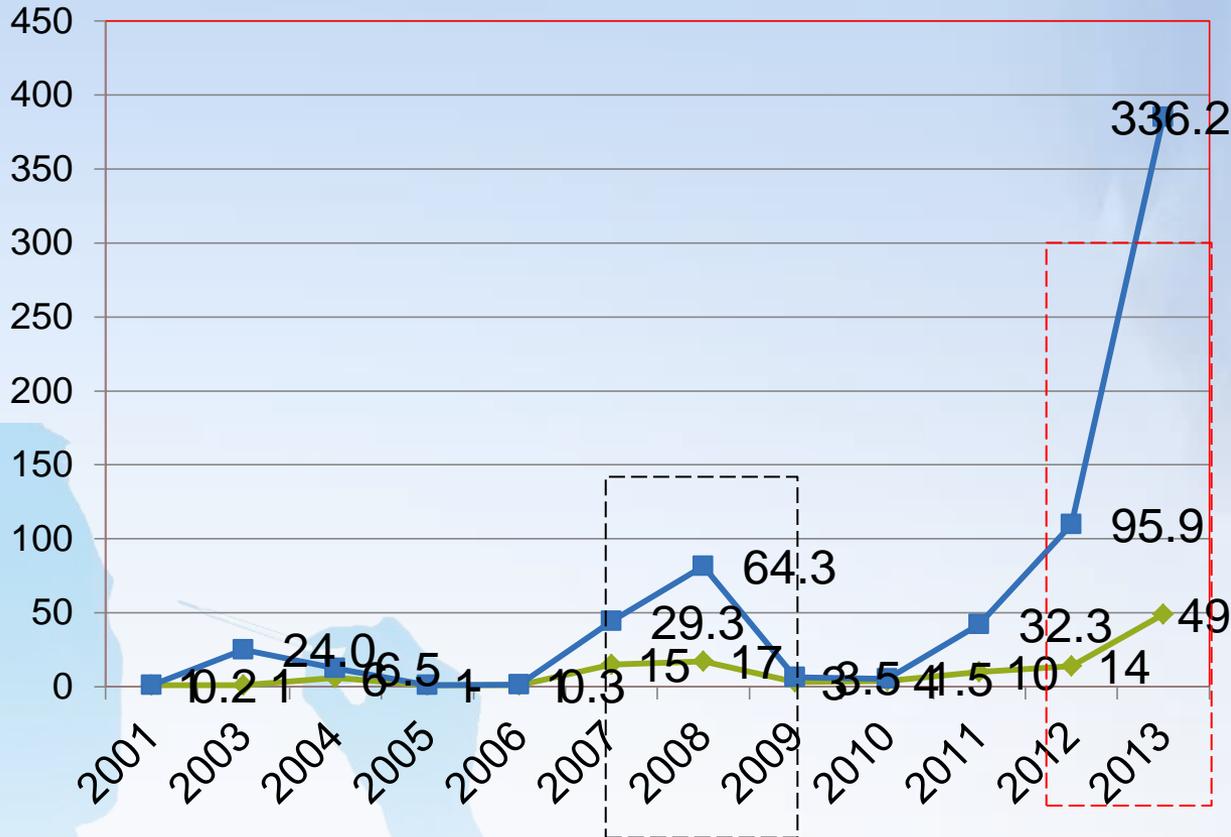
Tahun Terungkap	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
2001	1	0.2
2003	1	24.0
2004	6	6.5
2005	1	-
2006	1	0.3
2007	15	29.3
2008	17	64.3
2009	3	3.5
2010	4	1.5
2011	10	32.3
2012	14	95.9
2013	49	336.2
Total	122	594.0

1. Penindakan korupsi kesehatan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2001 hanya satu korupsi kesehatan yang ditindak. Kemudian terus meningkat pada tahun 2008 menjadi 17 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 64,3 miliar.
2. Puncak penindakan terjadi pada tahun 2013 dimana penegak hukum berhasil menindak 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 336,2 miliar

Tren Penindakan Korupsi Kesehatan 2001-2013



◆ Jumlah Kasus ■ Kerugian Negara (Rp miliar)



- Terdapat tren penindakan meningkat baik dari jumlah kasus maupun dari kerugian negara
- Terdapat pola berulang dimana puncak penindakan terjadi pada setahun sebelum pemilu (2008 dan 2013)
- Apakah dana korupsi kesehatan digunakan untuk dana kampanye ?
- Apakah program kesehatan digunakan menjadi instrumen politik ?
- Dua pertanyaan ini perlu dijawab melalui kajian lebih lanjut.

Obyek Korupsi Kesehatan



No	Obyek Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Dana Alkes	43	442.8
2	Dana Pembangunan/Rehabilitasi RS	19	51.4
3	Dana Obat	18	43.0
4	Dana PNBP	1	15.0
5	Dana Jaminan Kesehatan	16	14.6
6	Dana Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas	5	12.9
7	Dana Pengadaan Alat Lab	1	4.9
8	Pendapatan Rumah Sakit	3	3.3
9	Dana Operasional Rumah Sakit	4	2.2
10	Anggaran Pendidikan/Pelatihan	2	1.5
11	Dana Sarpras Puskesmas	4	1.3
12	Dana Posyandu	1	0.9
13	Dana Operasional Dinkes	2	0.2
14	Aset Dinkes	1	0.1
15	Dana Alat KB	1	0.0
16	Dana Sarpras Lab	1	0.0
	Total	122	594.0

- Dana Alkes merupakan dana paling banyak dikorupsi
 - Dana kuratif (alkes, pembangunan/rehabilitasi, obat, jaminan kesehatan, dsb) paling banyak dikorupsi
 - Dana promotif dan preventif dikorupsi jauh lebih kecil dibanding dana kuratif.
 - Celaknya, kuratif memiliki persentase paling besar dalam APBN dan APBD Kesehatan. Anggaran kesehatan belum menggunakan paradigma sehat sepenuhnya ?
-
- Apakah ada kesengajaan memperbesar dana kuratif daripada promotif dan preventif agar koruptor bisa menyelewengkan anggaran kesehatan lebih banyak ?

Modus Korupsi Kesehatan



No	Modus Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Mark up	62	506.7
2	Penyalahgunaan Anggaran	14	33.0
3	Penggelapan	28	25.1
4	Pengadaan Fiktif/Manipulasi Tender dan Data	11	25.7
5	Penyuapan	2	3.1
6	Penyalahgunaan Wewenang	3	0.4
7	Honor Fiktif	1	-
8	Pungutan Liar	1	-
Total		122	594.0

Mark up atau penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa merupakan modus paling umum digunakan oleh pelaku korupsi kesehatan.

Lembaga Tempat Terjadi Korupsi



No	Lembaga Tempat Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Kemenkes	9	249.1
2	Dinkes Kab/Kota/Provinsi	46	191.0
3	Rumah Sakit	55	118.0
4	B POM dan Lembaga Kesehatan lainnya	1	15.0
5	Puskesmas	9	11.1
6	BUMN/BUMD Kesehatan	1	9.0
7	Ormas/Yayasan	1	0.9
Total		122	594.0

- Kemenkes merupakan lembaga tempat korupsi kakap
- Meski jumlah kasus kecil namun kerugian negara yang ditimbulkannya sangat besar. Kerugian negara melebihi kerugian negara karena kasus korupsi yang terjadi di 46 dinkes dan 55 rumah sakit di Indonesia

Lokasi Korupsi Kesehatan



No	Provinsi (Lokasi) Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Pusat	12	273.15
2	Banten	9	71.59
3	Sumut	15	59.16
4	DI Aceh	8	36.25
5	Jabar	12	28.01
6	Kaltim	3	26.11
7	Sumsel	4	18.26
8	Bengkulu	6	10.52
9	DI Yogyakarta	2	10.00
10	DKI Jakarta	3	8.85
11	Lampung	5	8.48
12	NTB	2	7.70
13	Jambi	1	7.50
14	Riau	7	6.99
15	Kalteng	2	5.10
16	Sulteng	3	4.79
17	Jateng	10	3.97
18	Bali	1	2.30
19	Jatim	7	2.08
20	Sulsel	2	1.00
21	Maluku	3	0.74
22	Papua	1	0.70
23	Gorontalo	1	0.40
24	Kalsel	1	0.30
25	NTT	2	0.11
Total		122	594.04

- **Episentrum** korupsi kesehatan berada dipemerintahan pusat (eksekutif, legislatif maupun BUMN Kesehatan
- Banten dan Sumut menempati urutan kedua dan ketiga dalam lokasi korupsi kesehatan

Tersangka Korupsi Kesehatan



Jabatan Tersangka	Jumlah Tersangka	Persentase
Panitia Pengadaan di Kemenkes dan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov	53	20.9
Rekanan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov	51	20.0
Kadinkes Kab/Kota/Provinsi	31	12.2
Pejabat/Pegawai Dinkes Kab/Kota/Provinsi	22	8.7
Data Belum Tersedia	14	5.5
Direktur Rumah Sakit	14	5.5
Pejabat/Pegawai Kemenkes	12	4.7
Pejabat/Pegawai RS	12	4.7
Pejabat/Pegawai Pemkab/Pemkot/Pemprov Non Dinkes	10	3.9
Pejabat/Pegawai BUMN/BUMD Kesehatan	9	3.5
Pimpinan/Anggota DPR/DPRD	7	2.8
Kepala Puskesmas	5	2.0
Bupati/Walikota/Gubernur	3	1.2
Rekanan Rumah Sakit	3	1.2
Ketua Yayasan/Ormas	2	0.8
Masyarakat	2	0.8
Menkes	2	0.8
Dirjen Kemenkes	2	0.8
Pejabat/Pegawai Badan Terkait Kesehatan	1	0.3
Total	255	100.0

- Koruptor kakap disumbang oleh Kemenkes
- 2 Menkes dan 2 Dirjen serta pejabat Kemenkes lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus korupsi kesehatan
- 3 Kepala Daerah dan 31 Kepala Dinkes Provinsi/Kab/Kota serta 14 Direktur RS juga ditetapkan sebagai tersangka.

- 53 Panitia pengadaan barang dan jasa kesehatan juga telah ditetapkan sebagai tersangka
- 54 Rekanan Kemenkes, Dinkes dan Rumah Sakit juga ditetapkan sebagai tersangka

Tersangka Korupsi Kesehatan



- Korupsi Kesehatan dilakukan secara “berjamaah” antara Pejabat, Panitia Pengadaan, PPK, P4TK, dan Rekanan Pengadaan.

Penindakan Korupsi Kesehatan Menurut Penegak Hukum



No	Penegak Hukum	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Mabes Polri	3	163.0
2	KPK	7	131.2
3	Kejari	50	106.9
4	Kejati	24	89.6
5	Kejagung	4	53.8
6	Polda	8	33.7
7	Pengadilan Tipikor	8	6.1
8	Belum teridentifikasi	8	5.9
9	Polres	10	3.8
Total		122	594.0

- Kasus korupsi kesehatan banyak ditindak oleh Kejaksaan terutama Kejari dan Kejati.
- Namun demikian, Mabes Polri menangani kasus korupsi kesehatan kakap (kerugian negara sangat besar)

Kinerja Penegak Hukum Menindak Korupsi Kesehatan



Tabel 8. Tabulasi Silang Perkembangan Penindakan Korupsi Kesehatan Menurut Lembaga Penindakan

		Perkembangan Penyidikan Kasus Korupsi Kesehatan Yang Disidik Sejak 2008							Total
		Vonis Bersalah	Belum Ada Perkembangan	Proses Persidangan	Vonis Bebas	DP O	S P3	Kasasi	
Lembaga Yang Menangani Kasus Korupsi	Kejagung	1	2	0	0	0	0	0	3
	Kejari	1	11	0	1	0	0	0	13
	Kejati	0	7	3	0	0	1	0	11
	Mabes Polri	0	0	0	0	1	0	0	1
	Polda	0	1	0	0	0	0	0	1
	Polres	0	1	0	0	0	0	1	2
	Pengadilan	6	0	0	0	0	0	0	6
	Belum diketahui	0	4	1	0	0	0	0	5
Total		8	26	4	1	1	1	1	42

- Kinerja Penegakan Hukum Korupsi Kesehatan masih rendah.
- Dari 42 kasus yang ditindak sebelum tahun 2009, 26 kasus diantaranya tidak jelas perkembangan penanganan
- Kejaksaan merupakan paling banyak menunggak penanganan kasus korupsi kesehatan.

Nilai Temuan Audit BPK Pada Kemenkes



Temuan, Rekomendasi dan Tindaklanjut		Tahun Audit					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
Temuan	Jumlah	43	72	53	116	43	327
	Nilai dalam miliar rupiah	218,5	454,0	25,1	1,097,9	1,005,1	2,800,7
	Nilai dalam mata uang lainnya	USD 125.88	-	-	SAR 121.50	-	USD 125.88 dan SAR 121.50
Rekomendasi	Jumlah	80	103	93	235	148	659
	Nilai dalam miliar rupiah	41,4	78,7	22,1	267,7	948,9	1,358,7
	Nilai dalam mata uang lainnya	USD 125.88	-	-	-	-	USD 125.88
Tindaklanjut	Sesuai dengan rekomendasi						
	Jumlah	71	58	55	69	23	276
	Nilai dalam miliar rupiah	1,3	2,1	19,9	128,7	0,9	153,0
	Nilai dalam mata uang lainnya	-	-	-	-	-	-
	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindakanlanjut						
	Jumlah	9	36	38	157	104	344
	Nilai dalam miliar rupiah	40,0	76,6	2,2	138,8	192,7	450,4
	Nilai dalam mata uang lainnya	USD 125.88	-	-	-	-	-
	Belum Ditindaklanjuti						
	Jumlah	-	9		9	21	39
	Nilai dalam miliar rupiah	-	-	-	0,9	755,2	755,4
	Nilai dalam mata uang lainnya	-	-	-	-	-	-
Tidak Dapat Ditindaklanjuti							
Nilai dalam miliar rupiah	-	-	-	-	-	-	
Nilai dalam mata uang lainnya	-	-	-	-	-	-	
Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	1,3	2,9	20,1	13,8	2,5	40,6	

Kesimpulan



1. Anggaran Kesehatan masih sangat rawan korupsi. Pemantauan ICW selama 2001-2013 terhadap 122 kasus korupsi yang berhasil ditindak: tersangka 255 orang, dan kerugian negara Rp 594,0 miliar.
2. Aktor pelaku korupsi kesehatan (tersangka) berasal dari pejabat tinggi sektor kesehatan, seperti: menteri kesehatan (2 orang), dirjen (2 orang), kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota (31 orang), direktur rumah sakit (14 orang), gubernur/walikota/bupati (3 orang) dan pimpinan DPRD (7 orang).
3. Korupsi kesehatan banyak menggerogoti anggaran untuk kuratif (alkes, obat, pembangunan rumah sakit/puskesmas, dan jaminan kesehatan). Hal ini tidak sesuai dengan paradigma sehat yang memprioritaskan pencegahan (preventif) dibandingkan pengobatan (kuratif).
4. Pemerintahan pusat terutama Kementerian Kesehatan merupakan instansi paling besar memicu kerugian negara dalam korupsi kesehatan. Meski jumlah kasus kecil, kerugian negara sangat besar.
5. Kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi kesehatan masih rendah. Dibuktikan dengan masih belum adanya perkembangan sejumlah kasus korupsi kesehatan yang ditangani sejak tahun 2009.

Thank You!

